

DAFTAR PUSTAKA

A.Literatur

- Amiruddin Dan Zainal Asikin.2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahab.2012.*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang DiIndonesia*,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- A.Gunawan Setiardja.1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Barda Nawawi Arief.2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta : Kencana
- Evi Hartati,Tindak Pidana Korupsi,Jakarta : Sinar Grafika
- F.Sugeng Istanto.Abdul Latif,Hasbi Ali.2010.*Politik Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Fitria,*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- Jimlyn Asshiddiqie,2011.*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,Jakarta : Sinar Grafika
- Kristiana, Y.2006.*Indepenndensi Kejaksaan Penyidikan Korupsi*, Citra AdityaBakti,Bandung.
- Komisi Pemberantasan *Korups*.2006.*Memahami Untuk Membasmi*, jakarta:KPK
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,Cetakan IV,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moh.Mahfud MD.2010.*Politik Hukum Di Indonesia*.Rajawali,Jakarta.
- Maris,M.2002.*Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.

Mirim Budiardjo, *Dasar Ilmu Politik Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Pudjiarto, 1994. *Politik Hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Stout HD, Irfan Fachruddin. 2004 *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni*, Bandung

Terry Abdulrahman. 2017, *Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Kpk*.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002 *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi

undang undang nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan pertama undang-undang Nomor 30 tahun 2002

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIV/2016
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XV/2017

C . Karya Ilmiah

Ateng Syafrudin, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Anne Safriani, Herry Susilowati, Maria Ulfa, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Hukum Acara Pidana*, Volume 29, No 1, Mimbar Hukum: 2017.

Danang Pambudhi, *Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran : Media dan Informasi PLEADS

Gunawan A. Tauda. 2011. *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 6, No. 2

Ismail, *“Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02, (2013), *Pidana*, Volume 29, No 1, MAIMBSR Hukum: 2017

Rusadi Kantaprawira, *“Hukum dan Kekuasaan”*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998,

M.Syukri Akub, Slamet Sampurno, Syamsuddin Muchtar, *Hand Catch Operation'on Corruption Crimes : The Case Of the KPK in Indonesia*, Vol.81, Faculty Of Law, Hasanuddin University: 2019,

Ni' Matul Huda, *Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi*, Vol.24, No 24, Jurnal Hukum Ius Quio Lustum

Ujang Charda S., *“Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik”*, Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02 September (2012)

Oly Viana Agustine. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam system ketatanegaraan, volume 16 no 2 tahun 2019, pusat penelitian mahkamah konstitusi,

Majalah Konstitusi Nomor 160, 2020

D. Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/4061841/pakar-hukum-beberkan-alasan-revisi-uu-kpk-harus-dilakukan>

<https://www.youtube.com/watch?v=dkXN608cUN0&t=5581s>

<https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pwngawas-kpk.kkp.go.id/djpt/artikel/10643>

<https://www.jogloabang.com/politik/perpres-91-2019-organ-pelaksana-dewas-kpk>

<https://news.detik.com/kolom/d-4720900/tanpa-pengawasan-stigma-negatif-terhadap-kpk-bagian-pertama>

<https://www.Taufiqurrohman.co.id/> “Pro-Kontra Ide KPK Bisa Menerbitkan SP3 “, Kompas Rabu, 17 Juni 2015, .

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/17/18585661/kpk-punya-kewenangan-menerbitkan-sp3-dengan-jangka-waktu->

<https://www.voaindonesia.com/a/Presiden-didesak-terbitkan-perppukpk/5113600.html>

<https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pwngawas-kpk.kkp.go.id/djpt/artikel/10643>

<https://www.youtube.com/watch?v=dkXN608cUN0&t=5581s>

Rosseno Aji. 2019 LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi. <https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi/full&view=ok>

<https://www.liputan6.com/news/read/4061841/pakar-hukum-beberkan-alasan-revisi-uu-kpk-harus-dilakukan>.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7113/4/BAB%20III.Pdf>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uin-suska.ac.id>

Center For Indonesia Taxation Analysisfor Better Indonesia Tax Polic